



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

Rabu, 15 September 2021
Edisi : 00226492 /GBR/IX/2021

KLIPING

Berita Pertanian



BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Jl. Harsono RM. No 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Telp. (021) 7806 131 Ext. 2303, 2308, Email : humas-ip@pertanian.go.id
Website : www.pertanian.go.id

GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

RABU, 15 SEPTEMBER 2021

I. BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :

1. TANAMAN PANGAN :
 - Daerah Harus Dorong Petani Segera Tanam Padi (ID)..... 1
2. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN :
 - Bertahap Pemerintah Beli Telur Ayam untuk Bansos (KN)..... 2
3. PERKEBUNAN :
 - Pemerintah Berupaya Sejahterakan Pekerja Sawit (ID)..... 3
 - Sawit (BI)..... 10
 - Kontribusi Sawit di Tengah Serangan Kampanye Hitam (ID)..... 11-12
4. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN :
 - Petani Sikka Sambut Pertanian Modern (MI)..... 4
 - Pupuk Indonesia Optimis Target Agrosolusi Tercapai (R)..... 5
5. KETAHANAN PANGAN :
 - Holding BUMN Pangan Masuki Persiapan Merger (ID)..... 6
6. PERTANIAN UMUM :
 - Wilmar Perluas Program Kemitraan dengan Petani (ID)..... 7
 - Pertanian Kunci Pertumbuhan (BI)..... 8-9
 - Mengakselerasi Korporasi Petani (R)..... 13-14

00000000 O 00000000

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☒ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 15/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Daerah Harus Dorong Petani Segera Tanam Padi

JAKARTA – Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa menyatakan bahwa bulan ini sebagian wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan dan hal tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk mendorong produksi pangan, khususnya padi/beras. Peran pemerintah daerah (pemda) sangat diperlukan agar petani bisa segera memulai tanam, seperti melakukan pendampingan dan membantu menjaga ketersediaan pupuk.

Dwi Andreas menjelaskan, pemanfaatan musim hujan yang seimbang akan berdampak pada peningkatan hasil produksi pangan. "Pemda harus bisa mendorong petaninya untuk segera bersiap memproduksi pangan dengan memulai tanam untuk memanfaatkan musim hujan. Percepat produksi pangan di saat musim yang lagi bagus ini, jangan sampai petani tidak bekerja karena akan rugi nanti," ujar Andreas ketika

dihubungi *Investor Daily* di Jakarta, Selasa (14/9).

Petani dengan dibantu pemerintah juga harus menyiapkan bekal untuk mempercepat masa tanam dengan melakukan penyediaan bibit dan pupuk yang berkualitas. "Dengan adanya musim hujan ini maka kita bisa meningkatkan produksi beras, semakin banyak produksi beras maka semakin banyak daerah yang surplus. Usahakan pada September ini tidak ada daerah yang defisit karena musim lagi bagus dan cocok menghasilkan kualitas tanaman padi terbaik," papar Andreas.

Plt Deputy Bidang Klimatologi BMKG Urip Haryoko mengatakan, sejumlah wilayah di Indonesia saat ini telah memasuki awal musim hujan, kondisi tersebut sebagai pertanda masa peralihan/transisi/pancaroba dari musim kemarau ke musim hujan. Berdasarkan analisis curah hujan pada dasarian I September 2021, sebanyak 3,22% wilayah

Indonesia telah memasuki musim hujan dan sebagian besar wilayah masih mengalami musim kemarau. Wilayah yang sudah mengalami musim hujan meliputi sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian besar Sumatera Barat, Kalimantan Selatan bagian selatan, dan Kalimantan Timur bagian selatan.

Prakiraan musim hujan tahun 2021/2022 BMKG menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami awal musim hujan 2021/2022 pada Oktober dan November 2021 sebanyak 232 ZOM (Zona Musim) atau sekitar 67,80%. Sifat hujan di sebagian besar daerah diprediksi normal sebesar 71,40%, sedangkan 25,70% di atas normal, serta 2,90% diprakirakan di bawah normal. Puncak musim hujan 2021/2022 di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan terjadi pada Januari dan Februari 2022 yakni sebanyak 71,30%. (dho/dl) 17.7

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 15/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1A / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☒ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

■ HARGA TELUR AYAM

Berharap Pemerintah Beli Telur Ayam untuk Bansos

JAKARTA. Para peternak ayam pada Kamis nanti (16/9) berencana bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut untuk membahas harga telur ayam ras yang anjlok di pasaran dalam beberapa minggu terakhir ini.

Ketua Umum Asosiasi Peternak Layer Nasional Musbar Mesdi berharap pemerintah dapat menyerap hasil telur ayam para peternak. Caranya

adalah dengan memasukkan telur ayam ke dalam paket bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

"Harapan kami ke Pak Presiden supaya telur dari peternak bisa diserap untuk paket bansos selama pandemi. Apalagi telur merupakan kapsul gizi yang bagus untuk meningkatkan imunitas," kata Musbar, Selasa (14/9).

Selain itu, peternak juga berharap pemberlakuan PPKM level 3 dan 4 dapat diperlonggar. Lantaran selama PPKM sektor hotel, restoran dan kafe (horeka) yang merupakan konsumen terbesar telur ayam belum beroperasi secara penuh. Selain itu, Musbar klaim PPKM juga berimbas penurunan konsumsi per kapita sebesar 39,33%.

Faktor inilah yang membuat harga telur terkoreksi hingga Rp 6.000 per kg dan saat ini harga di tingkat peternak di kisaran Rp 14.00 - Rp 15.500 per kg. "Sedangkan di satu sisi harga pakan tetap tinggi dan naik terus setiap bulannya," paparnya. **KN. 14**

Langkah lainnya yang cukup sulit direalisasikan adalah

meminta para peternak layer nasional untuk melakukan *cutting layer production* di-

mulai umur ayam 50 minggu ke atas. Langkah ini untuk menutupi biaya pakan yang sangat tinggi.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Oke Nurwan berjanji ke depan akan memastikan pasokan stok telur ayam serta alternatif pakan ternak ayam.

Ratih Waseso Aji

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 15/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Pemerintah Berupaya Sejahterakan Pekerja Sawit

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengupayakan terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di subsektor sawit sehingga pekerja di dalamnya makin sejahtera. Hal itu karena subsektor sawit merupakan salah satu industri yang berperan penting terhadap perekonomian Indonesia dan subsektor tersebut identik dengan pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja dengan tingkat mayoritas pendidikan rendah.

Merujuk Badan Pusat Statistik (BPS), pada November 2020, jumlah total luas areal sawit RI mencapai 14,60 juta hektare (ha), antara lain berupa Perkebunan Besar Negara (PBN) 614.756 ha (4,29%) dan Perusahaan Besar Swasta

(PBS) sebesar 55,09% atau seluas 7.892.706 ha. "Karena itu, subsektor sawit menjadi salah satu isu hubungan industrial yang perlu diperhatikan, khususnya mengenai perlindungan tenaga kerjanya," jelas Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri, Selasa (14/9).

Data Kementerian Pertanian pada 2019 menunjukkan, jumlah petani sawit 2,67 juta orang dan melibatkan 4,42 juta pekerja. Sebanyak 4 juta (90,68%) pekerja sawit di perusahaan besar swasta nasional, 321 ribu (7,26%) di perusahaan besar milik negara, dan 91 ribu (2,07%) di perusahaan besar milik swasta asing. Putri menuturkan hubungan kerja pekerja/buruh subsek-

tor perkebunan sawit sebagian besar dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk di dalamnya pekerja harian. "Ini berdampak pada perlindungan dan syarat kerjanya tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja (PHK)," tutur Putri.

Pemerintah berkepentingan agar produk-produk hasil industri dapat diterima secara kompetitif di pasar global. Dalam konteks ini, beberapa pembeli terkadang menghendaki standar-standar produksi yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau industri, karena itu terkait ketenagakerjaan perlu adanya penerapan standar kerja layak (*decent work*) di subsektor sawit. (ark) 12.7

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 15/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI 2/Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Petani Sikka Sambut Pertanian Modern

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat mengirimkan lagi alat pertanian untuk 21 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) guna mendukung pertanian modern di Kabupaten Sikka, NTT.

Bantuan alsintan yang dikirimkan berupa enam unit traktor roda dua, satu unit traktor roda empat, enam unit pompa air, satu unit *rice transplanter*, dua unit *cultivator*, dan lima unit *hand sprayer*.

Wakil Bupati Sikka Romanus Woga langsung menyerahkan bantuan alsintan itu kepada 21 Gapoktan. Ia mengatakan bantuan alsintan ini berasal dari Kementerian Pertanian atas usulan anggota DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat.

Masih terkait dengan ketahanan pangan, Provinsi Sumatra Utara bertekad mengembalikan Kabupaten Simalungun menjadi lumbung beras. Kecamatan Huitabayu Raja, Kabupaten Simalungun, dikenal sebagai lumbung pangan.

"Kita inginkan kembali julukan penghasil sebagai lumbung padi untuk daerah Simalungun dengan cara melakukan perbaikan sarana dan prasarana pendukung pening-

katan pertumbuhan tanaman pangan, khususnya tanaman padi di Simalungun," kata Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga.

Sama halnya di Bali, untuk mendukung ketahanan pangan di masa pandemi, Dinas Perikanan Kabupaten Badung menebar 30 ribu benih ikan nila di Jaba Pura Mumbul Sari dan saluran irigasi Desa Angantaka.

Pada bagian lain, peternak ayam petelur se-Jawa Timur yang tergabung dalam Gerakan Peternak Rakyat Indonesia (Gaprindo) mendatangi gedung DPRD Jatim. M. 9

Para peternak melakukan dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Jatim, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Satgas Pangan Jatim.

Koordinator Gaprindo asal Blitar, Yasin Nurcahyo, mengatakan dampak covid-19 juga dirasakan peternak ayam petelur di Jatim. Menurutnya, para peternak mengeluhkan harga pakan yang melambung tinggi, sedangkan harga jual telur di pasaran murah. "Ini kelebihan hasil produksi hasil ternak ayam," ujarnya. (FL/GL/YP/RS/MR/N-1)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 15/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Pupuk Indonesia Optimistis Target Agrosolusi Tercapai

■ MUHAMMAD NURSYAMSI

JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong peningkatan kesejahteraan petani dengan pendampingan intensif dan solusi budi daya pertanian berkelanjutan melalui Program Makmur.

Program yang diluncurkan Menteri BUMN Erick Thohir di Subang, Jawa Barat, pada bulan lalu itu sebelumnya bernama Agrosolution atau agrosolusi, yakni solusi pertanian yang menjadi inisiatif PT Pupuk Indonesia (Persero).

Senior Project Manager Program Makmur Pupuk Indonesia Supriyoto optimistis, target empat juta hektare (ha) yang dicanangkan Menteri BUMN dapat tercapai. Ia mengatakan, luas tanam Program Makmur hingga Agustus telah mencapai 40.332 ha dengan petani yang terlibat mencapai 28.884 orang.

Supriyoto menyebutkan, untuk target Program Makmur tahun ini sekitar 50 ribu ha dan akan terus meningkat menjadi 250 ribu ha pada tahun depan. Hingga nantinya target empat juta ha pada 2024.

"Kami optimistis target tersebut dapat tercapai. Tentunya membutuhkan dukungan para *stakeholder* yang terlibat, baik itu dari segi permodalan, agroinput, maupun *offtaker* dan asuransi," kata Supriyoto kepada *Republika* di Jakarta, Selasa (14/9).

Supriyoto menyampaikan, para petani peserta program mendapatkan jaminan permodalan, penyediaan pupuk berkualitas, benih, dan pestisida serta mendapatkan konsultasi dari para ahli agrokonomi.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga melakukan pengawalan teknologi bekerja sama dengan pemerintah setempat memberikan pendampingan kepada petani agar hasilnya optimal dan memastikan petani mendapatkan jaminan adanya pembeli dengan harga yang menguntungkan petani.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, ada pengakuan dari para petani dan pemilik lahan bahwa perusahaan BUMN mampu membuat petani di desa naik kelas. Ia menyebutkan, para petani mendapat bimbingan, mulai dari pupuk hingga pengolahan sawah sehingga mampu menaikkan produktivitas dan keuntungan bertani.

"Saya optimistis, jika para petani kita terus didampingi, difasilitasi, dan didukung ilmu pengetahuan serta teknologi nutrisi pertanian modern, petani kita makin makmur," ujar Erick.

Erick menambahkan, diperlukan pendekatan holistik untuk mencari solusi pertanian demi meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani Indonesia. Hal itu karena jumlah area persawahan di Indonesia meningkat dalam satu tahun terakhir, tapi hasil panennya mengalami penurunan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun ini tercatat total luas lahan pertanian mencapai 25,1 juta ha atau naik dari tahun sebelumnya sebanyak 24,1 juta ha. Namun, jumlah lahan panen menurun dari 10,68 juta ha pada 2020 menjadi 10,66 juta ha pada tahun ini.

Erick menilai Program Makmur harus memberikan banyak manfaat, seperti kenaikan produktivitas pertanian sehingga petani lebih untung, praktik pertanian unggul, dan penggunaan pupuk nonsubsidi untuk membantu kebutuhan mereka.

Salah satu peserta program, Supadman (55 tahun), petani yang berdomisili di Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, mengungkapkan, sangat senang karena mendapatkan banyak manfaat dari program ini.

"Kami memperoleh kebutuhan modal, pupuk, pestisida, dan lain-lain dalam bentuk barang. Kami juga banyak dibantu PPL, diberi pengarahan-pengarahan. Harga jual juga sudah jelas," kata Supadman. ■ *edi: citra listya rini*

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 15/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

Holding BUMN Pangan Masuki Persiapan Merger

JAKARTA—PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI Persero) menyatakan, proses pembentukan *holding* BUMN sektor pangan memasuki tahap penggabungan atau merger beberapa perusahaan. Saat ini, sedang disiapkan proses penggabungan PT Perikanan Indonesia dengan PT Perikanan Nusantara, proses penggabungan PT Sang Hyang Seri dengan PT Pertani, proses penggabungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan PT BGR Logistics.

Direktur Utama RNI Arief Prasetyo Adi mengatakan, sebagai koordinator BUMN klaster pangan, pihaknya saat ini melakukan persiapan penggabungan secara menyeluruh mulai dari aspek regulasi penggabungan, sumber daya manusia (SDM) dan organisasi dengan menyosialisasikan penggabungan kepada karyawan, aspek keuangan penggabungan perusahaan, operasional dan pengembangan IT (teknologi informasi), hingga aspek aset korporasi. "Seperti



Arief Prasetyo Adi

pada aspek IT, saat ini kami sudah memulai mengintegrasikan IT dan *supply chain*, melalui basis teknologi Internet of Things (IoT) dengan *interface* yang sederhana supaya semua anggota *holding* BUMN bisa terkoneksi secara paralel. Dengan demikian kami memberikan solusi *supply chain End to End* untuk petani/peternak/nelayan sepanjang rantai nilai pangan," ujar Arief.

Selain itu, lanjut dia, mekanisme dan otomatisasi untuk efisiensi pemrosesan *on farm* dan *off farm* juga disiapkan. Arief mengatakan, selama

persiapan penggabungan, pihaknya juga tengah melakukan pengembangan hilirisasi produk petani, di antaranya baru-baru ini merealisasikan program pengembangan produk baru beras premium Rania yang baru *soft launching* dua minggu lalu hasil kolaborasi RNI Group dengan PT Pertani, yang diminati konsumen secara nasional. "Dua minggu *soft launching*, pengembangan produk pangan ritel beras Rania tercatat penjualan sampai dengan 9 September 2021 sebanyak 48,10 ton beras Rania," kata Arief.

Persiapan penggabungan menuju *holding* BUMN pangan dilakukan dari berbagai aspek hulu ke hilir dan pengembangan produk ritel ini merupakan langkah inovasi untuk perbaikan ekosistem pangan, sebagaimana arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadikan BUMN pangan menjadi lokomotif penyeimbang dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. (tl/ant) 17-7

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 15/12/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2/1 |
| ☒ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Wilmar Perluas Program Kemitraan dengan Petani

JAKARTA – PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) siap memperluas program kemitraan dengan petani di seluruh Indonesia setelah program tersebut dinilai berhasil dikembangkan di sejumlah wilayah. Kemitraan dengan petani bertujuan agar mereka ikut sejahtera karena mendapatkan harga beli yang layak.

Rice Business Head PT WPI Saronto menjelaskan, pendampingan yang diberikan WPI juga dimaksudkan agar mereka dapat mempraktikkan kaidah pertanian dengan baik sehingga memperoleh hasil optimal. "Melalui pendampingan hasil panen diharapkan sesuai dengan standar perusahaan," kata Saronto.

Ke depan, PT WPI berencana

memperluas program kemitraannya di beberapa daerah di Indonesia karena program tersebut memperoleh dukungan dari masing-masing pemerintah daerah dan dinilai membantu meningkatkan produksi tanaman pangan. Dalam program tersebut, perusahaan menyediakan berbagai keperluan musim tanam dan memberikan pendampingan, termasuk menyerap seluruh hasil panen.

Sebelumnya, kelompok petani mitra perusahaan telah memanen di lahan tanam seluas 144 hektare (ha) dan rencananya mereka akan kembali panen serentak di lahan seluas 500 ha di tiga kabupaten, yaitu Mojokerto, Ngawi, dan Madiun. Sutrisno, ketua Gabungan Kelompok

Tani (Gapoktan) Makmur, Desa Kartoharjo, Ngawi, Jawa Timur, yang sudah dua kali musim tanam bermitra dengan PT WPI menyatakan selama bermitra memperoleh pendapatan yang lebih baik, terutama saat harga jual gabah kering panen (GKP) sedang tinggi seperti saat ini sebesar Rp 5.000 per kilogram (kg).

Meski harga itu masih dikurangi biaya operasional Rp 350-400 per kg, petani masih merasakan keuntungan seperti pada musim panen sebelumnya dengan harga gabah Rp 4.200 per kg. "Itu pun kami masih diperbolehkan membawa pulang 10% dari hasil panennya," kata Sutrisno. Petani juga tidak perlu kebingungan memperoleh pupuk, pestisida, dan benih

karena telah disediakan perusahaan dengan sistem Yarnen (bayar setelah panen). Dalam pendampingan tersebut, mereka menggunakan Pupuk Mahkota yang hasilnya terbukti meningkat minimal 11% dan tertinggi hingga 33%.

Sutrisno membandingkan kondisi sebelum bermitra mengalami kendala dalam memperoleh kebutuhan saat musim tanam, selain itu saat akan menjual hasil panen petani harus berhadapan dengan tengkulak yang merugikan mereka. Saat ini, jumlah anggota Gapoktan yang diketuainya 132 petani dengan luas lahan garapan 77 ha dari sebelumnya 23 orang dengan luas lahan garapan 20 ha. (dho) 17-7

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 15/3/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

PERTANIAN KUNCI PERTUMBUHAN

NI Putu Eka Wiratmini
putu.ekawiratmini@bisnis.com

Bisnis, DENPASAR — Sektor pertanian diproyeksi menjadi kunci penting dalam pemulihan ekonomi wilayah Bali dan Nusa Tenggara karena mampu menunjukkan kinerja yang cukup positif di tengah melambatnya sejumlah sektor akibat pandemi.

Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi mengatakan pangsa pertanian di wilayah Bali dan Nusa Tenggara secara rata-rata sebesar 20% dalam 10 tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan pangsa pertanian yang tercatat tertinggi dibandingkan 16 sektor lainnya.

Menurutnya, salah satu komoditas yang paling produktif dan memiliki pertumbuhan yang positif adalah komoditas perikanan berupa ikan tangkap maupun ikan budi daya seperti tuna, tongkol, udang segar, kepiting, maupun kerang, serta sejumlah ikan olahan. 131.7

"Hal ini sangat menggembirakan, dan perlu kita dukung mengingat potensi sektor perikanan sangat besar dan belum sepenuhnya optimal," katanya dalam webinar Transformasi Ekonomi: Balinusra Menuju Pertanian 4.0, Selasa (14/9).

Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Bali Trisno Nugroho mengatakan saat ini sektor pertanian memiliki peranan dalam menyerap tenaga kerja dari sektor

industri dan jasa yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi.

Serapan tenaga kerja sektor pertanian di Bali mencapai 23%, sedangkan di NTB dan NTT masing-masing sebesar 35% dan 54%.

"Pentingnya peranan lapangan usaha pertanian dalam ekonomi Balinusra juga tergambar dari penduduk yang bekerja di sektor pertanian," katanya.

Potensi sektor pertanian kawasan tersebut juga terlihat dari sisi ekspor. Ekspor komoditas pertanian dan kelautan Balinusra memiliki pangsa 13,5% dari total ekspor, menurun dibanding dengan tahun sebelumnya yang mencapai 18,9%.

Berbagai komoditas pertanian dan produk kelautan yang men-

jadi penopang ekspor antara lain adalah kepiting, udang, ikan tuna, mutiara, dan rumput laut. Sedangkan komoditas pertanian lainnya adalah hortikultura yakni tanaman obat, buah-buahan, panili, kopi, dan kakao.

Meskipun demiki-

an, sektor pertanian memiliki sejumlah tantangan berupa dari sisi produksi, kelembagaan, hingga aspek pemasaran.

Pertama, dari aspek faktor produksi, teknologi produksi masih rendah dengan kapasitas SDM yang terbatas sehingga produktivitas dan nilai tambah pengolahan komoditas belum optimal.

Kedua, dari aspek kelembagaan, peran kelompok tani juga masih belum optimal baik dari hulu seperti pengawasan praktek bertani yang baik (*good agriculture practices*) maupun sampai sisi hilir seperti implementasi korporatisasi petani untuk mencapai skala ekonomi, mendapat pembiayaan, dan pasar yang lebih pasti.

Ketiga, aspek pemasaran dengan adanya tantangan menuju perdagangan luar negeri yang mencakup hambatan tarif berupa pajak ekspor maupun nontarif seperti persyaratan maupun sertifikasi dan lain sebagainya yang

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

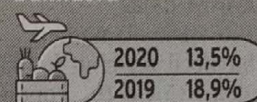
- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 15/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

NTT PALING CEPAT

Sektor pertanian menjadi kunci pemulihan ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) karena dapat menunjukkan kinerja positif di tengah melambatnya sejumlah sektor akibat pandemi. Bank Indonesia menilai pemulihan ekonomi di Nusa Tenggara Timur lebih cepat dibandingkan dengan Bali dan Nusa Tenggara Barat.



Pangsa Ekspor Komoditas Pertanian Balinusra



Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

2019	
● Kuartal I	: 5,98%
● Kuartal II	: 5,64%
● Kuartal III	: 5,28%
● Kuartal IV	: 5,51%
2020	
● Kuartal I	: -1,20%
● Kuartal II	: -11,06%
● Kuartal III	: -12,32%
● Kuartal IV	: -12,21%
2021	
● Kuartal I	: -9,81%
● Kuartal II	: 2,83%

Serapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Balinusra (%)

"Bali menjadi provinsi yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi paling dalam di Indonesia, yakni sampai minus 12% lebih, ini menguatkan kesadaran kami bahwa pembangunan Bali selama ini timpang, tidak *balance*," katanya, Selasa (14/9).

Sebelum ada badai pandemi Covid-19, pariwisata Bali sangat berkaitan dengan pertanian karena roh pariwisata di Bali dinilai berasal dari budaya agraris yakni pertanian.

Menurut Cok Ace, pemerintah Bali sudah berupaya untuk mendorong serapan produk pertanian ke pariwisata. Selama pandemi Covid-19, produksi pertanian yang meningkat tidak didukung daya serap yang tinggi dari hotel dan restoran.

"Kondisi ini membuat *oversupply* produk pertanian, hubungan pertanian dan pariwisata di Bali tidak bisa kita pisahkan, oleh sebab itu saya melihat ketimpangan ini sejak awal," sebutnya.

dikenakan oleh negara pasar.

"Untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian, diperlukan transformasi pertanian ke arah digitalisasi pertanian."

PEMBANGUNAN TIMPANG

Pemprov Bali menilai pembangunan ekonomi daerah tersebut selama ini mengalami ketimpangan dari sisi wilayah maupun sektor-sektor penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Wakil Gubernur Bali Tjorkorda Oka Artha Ardana Sukawati mengatakan pertumbuhan ekonomi Bali selatan selama ini jauh lebih cepat dibandingkan Bali utara maupun Bali timur.

Perlu diketahui, Bali selatan selama ini unggul dari sisi ekonomi dengan mengembangkan pariwisata. Berbeda dengan Bali utara dan Bali timur yang lebih

Ini menguatkan kesadaran kami bahwa pembangunan Bali selama ini timpang, tidak *balance*.

mendorong pertanian.

Begitu juga dengan sektor yang memengaruhi PDRB. Selama ini, Bali terlalu bergantung pada sektor tersier yakni pariwisata dalam memengaruhi kondisi ekonomi. Setidaknya, sektor pariwisata menyumbang 66,51% PDRB Bali.

Sementara itu, sektor primer yakni pertanian dalam arti luas hanya menyumbang 16,04% dan sekunder yakni industri kecil sebesar 17,45%.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 15/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

SPEKTRUM

Sawit

Zufrizal
zufrizal@bisnis.com

Elaeis guineensis adalah nama latin dari tanaman kelapa sawit yang sampai kini masih menjadi salah satu primadona ekspor Indonesia.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat bahwa volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia pada 2020 sebanyak 34 juta ton.

Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan capaian 2019 yang mencatat volume ekspor 37,39 juta ton akibat pandemi Covid-19 yang berdampak global. Akan tetapi secara nilai, volume ekspor selama 2020 meraup devisa US\$22,97 miliar, sedangkan realisasi pada 2019 sebesar US\$20,22 miliar. **61,3**

Kelapa sawit bukanlah tanaman endemis Indonesia, melainkan berasal dari Afrika, tepatnya dari hutan hujan tropis di daerah antara lain Pantai Gading, Guinea, dan Liberia, yang secara geografis berada di kawasan Afrika Barat.

Kelapa sawit pertama kali ditemukan oleh Nicholaas Jacquin pada 1763. *Elaeis* dalam bahasa

Yunani bermakna minyak, sedangkan kata *guineensis* disebut-sebut diambil dari nama negara Guinea.

Keberadaan tanaman kelapa sawit di Indonesia, berdasarkan catatan Gapki, bermula dari empat biji kelapa sawit yang dibawa oleh orang Belanda dan ditanam di Kebun Raya Bogor pada 1848. Sejak 1910 dibudidayakan di Sumatra.

Sampai dengan 2018, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, total luas perkebunan kelapa sawit lebih kurang 14,33 juta hektare.

Dari luasan tersebut, lebih dari 50% diusahakan oleh perusahaan besar swasta yaitu seluas 7,89 juta hektare atau 55,09% dari total luas lahan. Perkebunan rakyat menempati posisi kedua seluas 5,82 juta hektare atau 40,62%, sedangkan sebagian kecil diusahakan oleh perkebunan besar negara yaitu 614.756 hektare atau 4,29%.

Selama 2014—2018, luas areal perkebunan kelapa sawit rata-rata mengalami peningkatan 7,89% per tahun sehingga total pertambahan luas selama periode tersebut 3,57 juta hektare.

Pada Rabu (19/9), Presiden Joko

Widodo me-

nandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Instruksi dalam beleid itu berlaku hingga September 2021.

Inpres itu berisi sejumlah instruksi kepada beberapa menteri dan kepala daerah untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit nasional. Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misalnya, Presiden Jokowi menginstruksikan agar menunda pelepasan kawasan hutan atau tukar-menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

Meskipun masa berakhirnya moratorium sawit tinggal beberapa hari, pemerintah belum bersikap apakah akan memperpanjang masa moratorium atau tidak.

Di satu sisi, para pegiat masalah lingkungan berharap agar moratorium sawit tetap dilanjutkan. Di sisi lain, pengusaha yang diwakili Gapki menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah.

Berlanjut atau tidak?



SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 15/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 4 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Kontribusi Sawit di Tengah Serangan Kampanye Hitam

Sektor agribisnis memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Bank Dunia, sejak tahun 1990 sektor agribisnis atau pertanian selalu menyumbangkan lebih dari 12% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Oleh Teguh Patriawan *)

Selain itu, sektor agribisnis juga merupakan tumpuan ekonomi dari banyak masyarakat yang hidup di lingkungan perdesaan. Secara keseluruhan, bisa dikatakan bahwa sektor ini berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 20 juta jiwa masyarakat Indonesia (data Kementerian Pertanian, 2018).

Beberapa komoditas unggulan sektor agribisnis di antaranya adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, teh, dan kopi. Selain itu, kelapa, kina, tebu, karet, dan tentunya juga kelapa sawit yang bisa dikatakan sebagai komoditas strategis. Kelapa sawit memiliki peran dalam pembangunan ekonomi nasional, karena sebagaimana ditekankan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Indonesia adalah negara penghasil sawit terbesar di dunia.

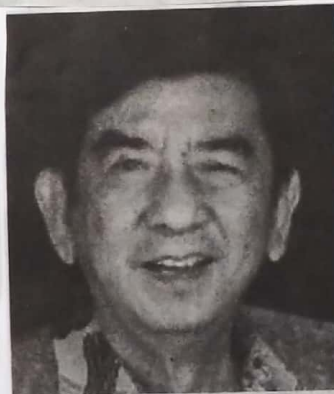
Semakin tahun, populasi penduduk dunia terus bertambah. Hal ini tentu akan berdampak pada kebutuhan terhadap minyak nabati dunia yang juga akan terus meningkat. Kebutuhan minyak nabati tersebut akan sulit terpenuhi apabila hanya dipenuhi oleh minyak

nabati subtropis seperti *soybean*, *rapeseed*, dan *sunflower* karena faktor efisiensi yang berada di bawah kelapa sawit. Dalam hal produksi, kelapa sawit bisa menghasilkan 4 ton/ha, sedangkan *soybean* hanya menghasilkan kurang dari 1 ton/ha.

Kini, permintaan minyak nabati di pasar global terus meningkat, termasuk minyak sawit mentah (*crude palm oil*/CPO) dan turunannya. Demi memenuhi kebutuhan dunia dan menjaga penggunaan lahan dunia yang terbatas secara efisien, kelapa sawit harus diberi peran lebih dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia. Terlebih, Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia seharusnya mampu menikmati lebih banyak manfaat dari situasi ini.

Namun, kampanye hitam (*black campaign*) terhadap industri sawit membuat persepsi masyarakat terhadap sektor ini menjadi buruk, meski memiliki kontribusi yang besar terhadap ekonomi nasional.

Apakah perkebunan sawit mengeksploitasi alam? Perkebunan sawit tidak bisa dikatakan mengeksploitasi alam. Hal ini dikarenakan prinsip perkebunan kelapa sawit adalah budidaya tanaman. Ada masa tanam, perawatan dan ada masa panen. Jadi, perkebunan sawit tidak mengandalkan



■ Teguh Patriawan

alam saja untuk memproduksi CPO berkualitas.

Bahkan perkebunan kelapa sawit selalu melakukan *re-planting* tanaman tua yang tidak lagi produktif. Hal ini sejalan dengan pernyataan Patrick Moore, *Co-Founder* Greenpeace, yaitu menanam pohon dan menggunakan pohon itu bagus, menanam pohon dan menebang pohon lagi juga tidak masalah karena pohon dapat

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 15/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 4 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

menyimpan karbon dioksida dari atmosfer dalam jangka waktu lama (sekuestrasi karbon).

Sekuestrasi karbon sebetulnya juga menjadi salah satu cara mitigasi pemanasan global dan perubahan iklim. Sekuestrasi karbon juga menjadi cara dalam memperlambat akumulasi gas rumah kaca yang kemudian dapat menimbulkan efek rumah kaca.

Meski diterpa oleh serangan kampanye hitam, industri sawit tetap setia menopang perekonomian nasional. Bukan main-main, ekspor sawit sudah menyumbang devisa sekitar US\$ 20 miliar hingga US\$ 25 miliar per tahun. Lalu dari hulu ke hilir, industri sawit mampu menyerap 20 juta tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung.

Di masa pandemi, sub sektor perkebunan sawit juga membuktikan keperkasaannya. Berdasarkan data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), sektor ini mampu bertahan pada saat semua sektor ekonomi terpuruk. Harga CPO menembus level US\$ 1.000 per ton pada Mei 2021.

Keberlanjutan

Dalam beberapa tahun terakhir, perkebunan sawit di Indonesia umumnya sudah menerapkan prinsip *sustainability* atau keberlanjutan. Perlu juga dipahami bahwa *sustainable development* tidak hanya seputar masalah budidaya, produksi dan keuntungan bisnis, tetapi juga perannya kepada masyarakat.

Masyarakat lokal yang berada di kawasan perkebunan sawit dan juga para petani sawit adalah bagian penting dari keberlangsungan industri sawit. *Community empowerment* terhadap masyarakat setempat sudah menjadi tanggung jawab bagi perusahaan sawit.

Contoh dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan antara

lain adalah meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan kesehatan, sosial, ekonomi, dan juga kemanusiaan. Hal-hal ini menunjukkan bahwa industri sawit, seperti industri lain pada umumnya, juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat ataupun kepedulian sosial perusahaan (CSR).

Memelihara lingkungan, mengembangkan komunitas, memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan para petani, sudah menjadi hal yang diterapkan oleh banyak perusahaan sawit. Komitmen dalam menjaga lingkungan juga ditunjukkan perusahaan sawit dengan mengedukasi para petani terkait cara membuka lahan yang ramah lingkungan.

Dengan memaksimalkan lahan yang ada, produksi sawit nasional masih berpeluang ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan intensifikasi tanaman karena kegiatan ekstensifikasi semakin terbatas. Apalagi, tidak semua wilayah di Indonesia sesuai untuk budidaya sawit.

Menjawab berbagai tuduhan kampanye hitam harus berdasarkan data, logika, dan fakta. Kita semua perlu sadar bahwa berbagai tuduhan kampanye hitam terhadap industri sawit juga memiliki unsur politis yang dibawa oleh kelompok tertentu.

Dengan kerja sama dan komitmen bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku industri dan masyarakat bisa diyakini bahwa industri sawit tetap mampu bertahan di tengah badai kampanye hitam. Dan, kita semua tengah berusaha agar CPO Indonesia bisa menjadi penguasa pasar minyak nabati di dunia.

*) Direktur Utama dan Pendiri PT Nusantara Sawit Sejahtera.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 15/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Mengakselerasi Korporasi Petani

HERMANTO, Koordinator Substansi Perencanaan Wilayah, Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian

Melalui korporasi petani, asas *economic of scale* dapat diterapkan.

Korporasi petani merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi petani, yang memiliki dimensi strategis dalam pembangunan pertanian. Dengan kondisi pertanian Indonesia yang sebagian besar digeluti petani dengan skala usaha tani relatif sempit atau kurang dari 0,5 hektare (ha), hampir tidak mungkin petani dapat mengorganisasikan dirinya sendiri secara efektif dan efisien sehingga petani cenderung bekerja sendiri-sendiri.

Akibatnya, biaya transaksi usaha taninya menjadi lebih besar per satuan nilai *output* yang dihasilkan.

Karena itu, sudah saatnya para petani diorganisasi dan didorong untuk berkolaborasi dalam suatu korporasi petani, yang memiliki skala ekonomi sehingga mampu meningkatkan efisiensi usaha taninya dan kesejahteraannya.

Dengan demikian, pengembangan korporasi petani sudah menjadi suatu keharusan dalam pembangunan pertanian.

Namun, pengembangan korporasi petani belum berjalan mulus, meskipun telah tertuang dalam RPJM 2020-2024 sebagai proyek prioritas strategis nasional (*major project*), dengan program "Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan".

Artikel ini menguraikan konsep dasar dan menganalisis kendala pengembangan korporasi petani serta strategi, untuk mengakselerasi pengembangan korporasi petani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Konsep dasar

Korporasi petani adalah suatu kesatuan badan usaha yang dibentuk dari, oleh, dan untuk petani. Melalui korporasi petani, asas *economic of scale* dapat diterapkan sehingga pengelolaan sumber daya dalam suatu kawasan pertanian bisa lebih optimal.

Hal ini bisa dilakukan dengan mengintegrasikan fungsi keseluruhan rantai nilai dari hulu ke hilir, subsistem prasarana, sarana dan budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran, serta jasa pendukung dan industri penunjang dengan budi daya pertanian sebagai simpul inti.

Transformasi pertanian dari semula berdasarkan asas ekonomi konvensional menjadi berbasis ekonomi modern adalah esensial dalam membangun korporasi petani. Transformasi tersebut ditempuh melalui tiga jalan secara bersamaan.

Pertama, transformasi pengembangan bisnis/usaha sehingga potensi berusaha para petani ditumbuhkembangkan, kemudian diimplementasikan menjadi sumber pendapatan yang optimal.

Kedua, transformasi pengembangan kelembagaan petani sehingga peluang berusaha dapat didistribusikan, dan modal ekonomi dan modal sosial disinergikan, serta potensi manfaat/keuntungan berusaha dapat dibagikan secara berkeadilan. Sedangkan yang ketiga, transformasi teknologi melalui adopsi inovasi modern.

Kendala pengembangan

Pengembangan korporasi petani mulai diinstruksikan Presiden Joko Widodo pada saat Rapat Terbatas Kabinet Kerja, 12 Sep-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 15/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

tember 2017, tetapi hingga saat ini belum berjalan secara optimal di lapangan.

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan korporasi petani, di antaranya, pertama, belum adanya payung hukum korporasi petani dan nelayan melalui peraturan presiden (perpres), yang mengatur tata laksana, pembagian tugas, dan kewenangan di setiap kementerian/lembaga (K/L) dalam membangun korporasi petani.

Kedua, belum terkoordinasi dan terintegrasi kegiatan pengembangan korporasi petani antar-K/L sehingga perencanaan dan pelaksanaannya, masih berjalan sendiri-sendiri dengan skema dan lokasi yang berbeda-beda.

Ketiga, belum adanya penguatan kebijakan afirmasi untuk mendorong terbentuknya korporasi petani yang profesional. Keempat, masih terbatasnya jejaring kerja sama bisnis dan akses pembiayaan untuk korporasi petani dalam menjalankan bisnisnya.

Kendala kelima, masih belum memadai prasarana dan sarana pendukung kegiatan produksi serta pengelolaan dan pemasaran hasilnya, lalu keenam, tidak mudahnya mengkonsolidasi petani karena petani terbiasa bekerja sendiri-sendiri dengan manajemen mandiri.

Halangan yang ketujuh, masih terbatasnya kapasitas SDM petani dalam mengelola korporasi petani secara profesional.

Strategi akselerasi

Dengan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan korporasi petani, tujuan dan sasaran pengembangan korporasi petani yang tertuang dalam RPJM 2020-2024, yaitu terjadinya peningkatan produktivitas dan pendapatan petani rata-rata lima persen per tahun, tidak mudah dicapai.

Karena itu, diperlukan suatu terobosan strategi, mengingat pengembangan korporasi petani bukan semata persoalan manajemen bisnis di tingkat mikro, melainkan sangat berkaitan dengan kebijakan di tingkat makro.

Keterpaduan formasi strategi makro-mikro yang diperlukan dalam pengembangan korporasi petani, di antaranya membuat payung hukum pengembangan korporasi petani dan nelayan melalui perpres, sebagai pandu-

an bagi K/L untuk mempercepat pengembangan korporasi petani.

Regulasi tersebut akan menjadi arah bagi pengembangan korporasi petani yang efisien, bentuk hukum, skema/sumber pembiayaan, dan keterlibatan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pengembangan korporasi petani.

Selain itu, penguatan kelembagaan petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani/gapoktan) yang dilakukan secara integratif dan konsolidatif, melalui peningkatan kapasitas SDM petani dan pengembangan investasi sosial.

Ada pula pengembangan sarana dan prasarana pendukung, peningkatan jejaring kerja sama bisnis dan penguatan manajemen kelembagaan petani. Kelembagaan petani ini diupayakan menjadi basis utama dalam pengembangan korporasi petani.

Strategi lain yang bisa ditempuh adalah pendampingan petani, kelompok tani, dan gapoktan dalam proses awal pengembangan korporasi petani, fasilitasi bantuan sarana dan prasana, membangun tata kelola yang baik dalam sistem korporasi yang terbentuk.

Hal ini sangat penting karena pengembangan korporasi petani membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

Hal yang juga penting adalah pelibatan sektor usaha swasta serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mengintegrasikan bisnisnya dalam korporasi petani, yang sekaligus menjalankan fungsi pemberdayaan untuk kemandirian dan keberlanjutan korporasi petani.

Terakhir, menyempurnakan berbagai dokumen terkait pengembangan korporasi petani, khususnya rancangan besarnya, pedoman umum, dan petunjuk pelaksanaan pengembangan korporasi petani supaya menjadi lebih mudah dipahami dan diimplementasikan para pihak yang terlibat.

Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan, membangun korporasi petani bukanlah pekerjaan mudah karena spektrum korporasi petani mencakup berbagai aspek kelembagaan, legal, permodalan, organisasi, bisnis, dan kebijakan yang harus disiapkan.

Korporasi petani harus dibangun secara komprehensif, dengan menjalankan prinsip dan nilai korporasi petani, serta melakukan perubahan dan percepatan tata kelola bisnis yang lebih modern.

Ini bisa ditempuh melalui berbagai strategi, yang mengedepankan upaya peningkatan daya saing, inovasi, dan kreativitas pengembangan tata kelola bisnis dengan menyinergikan keterlibatan pemangku kepentingan terkait, dalam satu pola sikap dan pola tindak pengembangan korporasi petani untuk kesejahteraan petani. ■